

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk kepulauan yang menerapkan sistem desentralisasi, dimana terjadi pelimpahan wewenang atau penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.¹ Sehingga pemerintah daerah dapat dengan leluasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya.

Sebagai kunci utama dalam menggerakkan roda pemerintahan, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah berhak untuk melakukan inovasi atau pembaharuan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini juga perlu diiringi dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dapat terlaksana dengan optimal. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.²

Untuk mengetahui seberapa besar kesiapan daerah dalam menggerakkan roda pemerintahan, salah satunya dapat diukur dengan seberapa besar kemampuan keuangan daerah tersebut untuk dapat menjalankan pemerintahannya. Perlu adanya manajemen pemerintahan yang efektif agar berbagai urusan pemerintahan dapat terselenggara dengan maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Salah satu pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah yaitu dalam hal pengelolaan aset, dimana aset daerah merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Aset daerah akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran roda pemerintahan. Sehingga sistem pengendalian atas pengelolaan aset yang profesional sangat diperlukan untuk mencegah penyelewengan yang dapat merugikan keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptakan suatu sistem manajemen yang dapat mendukung dalam optimalisasi aset daerah secara efektif dan efisien.

Secara umum, aset merupakan bagian dari kekayaan yang merupakan satu tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, ataupun ditimbang. Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang diperoleh atau dibeli atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah, sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.³

Dalam mengelola aset daerah pemerintah harus berfokus pada prinsip yang efisien, efektif, dan meningkatkan nilai tambah pada aset tersebut.⁴ Dengan pengelolaan aset yang baik dapat memudahkan untuk memberikan informasi laporan keuangan daerah dan dapat menjadi modal untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah.⁵ Salah satu sumber daya ekonomi yang ada di bawah naungan pemerintah daerah adalah aset. Untuk itu pemerintah daerah berhak memiliki serta menguasai aset yang berasal dari peristiwa masa lalu yang memiliki manfaat untuk kehidupan sosial dan ekonomi. Ada aset yang dapat diukur dengan uang dan ada yang termasuk non materi seperti sumber-sumber daya yang memiliki nilai budaya dan sejarah.⁶

Pemerintah daerah yang tidak dapat mengelola aset secara tepat akan menjadikan aset tersebut beban, karena aset tentu memerlukan perawatan dan pemeliharaan dengan biaya yang dianggarkan oleh pemerintah.⁷ Apabila pemerintah daerah tidak dapat dengan tepat dalam mengelola aset maka akan

³ Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

⁴ A. Ofia. 2020. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Aset Tetap di Kantor Camat Binjai Kabupaten Langkat*. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Vol 2 (02).

⁵ J. Friedman dan McLernon. 2016. *Manajemen Aset Infrastruktur Indonesia*. Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia, Vol 13 (3).

⁶ M. Sholikhah dan B.N. Achadiyah. 2017. *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah "Candi Rimbi" Jombang*. Jurnal Nominal, Vol 6 (2).

⁷ F.K. Bolendea, Ilat, dan J. Warongan. 2017. *Analisis Penggunaan Dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, Vol 12 (2).

membebani anggaran dan menjadikan nilai aset semakin turun.⁸ Dengan adanya pengelolaan aset yang baik maka dapat memudahkan untuk memperoleh informasi dan data untuk menyusun laporan keuangan daerah.⁹ Data tersebut yang akan menjadi dokumen dasar dalam mengelola barang milik daerah sesuai dengan perundang-undangan agar tetap tertib administrasi.¹⁰ Tertib administrasi dan penerapan sesuai dengan perundang-undangan dalam mengelola aset akan menunjukkan perspektif pemerintahan yang baik.¹¹

Aset merupakan sumber daya yang sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama dalam PAD. Pemerintah daerah harus bisa melakukan manajemen aset secara baik dan benar. Panduan dalam pengelolaan aset daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.¹² Aset yang telah memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan disebut dengan aset tetap, dimana aset tersebut merupakan investasi untuk jangka panjang serta bukan untuk diperjual belikan, sehingga perlu adanya manajemen aset yang tepat. Dengan adanya manajemen aset yang tepat maka dapat membantu suatu instansi untuk mengidentifikasi daftar kekayaannya. Hal ini tidak hanya untuk melihat aset mana saja yang telah dibeli, berapa biayanya, serta aset mana saja yang digunakan dan

⁸ Suparman dan Sangadji. 2018. *Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku*. Kelola: Jurnal Sosial Politik, Vol 1 (2), Hal 74-97.

⁹ Ibid.

¹⁰ Aira. 2015. *Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah*. Kutubkhanah, Vol 17 (1), Hal 21-39.

¹¹ Setiabudhi. 2019. *Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. The Studies of Social Sciences, Vol 1 (1), Hal 7-21.

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

bagaimana manfaatnya, namun untuk mencegah hilangnya aset atau pencurian aset dan yang paling penting yaitu untuk memudahkan proses pertanggung jawabannya, terutama instansi terkait yang bertanggung jawab kepada masyarakat.¹³

Manajemen aset daerah menjadi salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, serta penciptaan akuntabilitas publik.¹⁴ Dapat diartikan bahwa upaya melakukan pengelolaan aset daerah secara baik merupakan salah satu upaya yang diasumsikan dapat menciptakan *good local governance*.

Penelitian terkait manajemen aset telah banyak dilakukan. Penelitian ini berangkat dari adanya pengelolaan aset yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Manajemen aset tidak hanya sekedar bagaimana mengelola aset yang telah ada, namun juga menyangkut bagaimana untuk memanfaatkannya secara efektif dan optimal serta melakukan pemeliharaan terhadap aset tersebut, sehingga nilai aset tetap terjaga dari waktu ke waktu.

Beberapa penelitian tentang manajemen aset daerah yang dilakukan oleh Purwanti, Fariyanti, dan Witiyanto¹⁵, Lamangida¹⁶, Setiabudhi¹⁷, Marshaliany¹⁸,

¹³ Ibid.

¹⁴ Rizka Ananda Maharani, Bambang Utoyo, dan Eko Budi Sulistio. *Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019)*. 2020. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan, dan Pelayanan Publik*, Vol 2 (3), Hal 383-392.

¹⁵ Nurani Yuni Purwanti, Anna Fariyanti, dan Nirwan Ristiyanto. 2018. *Strategi Pengelolaan Aset Tetap di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol 10 (1), Hal 58-66.

Prasetya, Haryadi, dan Musyarofah¹⁹, Winarni dan Sari²⁰, Rahman, Heriyanto, dan Putro²¹, Maharani, Utoyo, dan Sulistio²², Basri²³, Nasir dan Lubis²⁴, Fitria dan Mubaroq,²⁵ menemukan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum optimal dalam mengelola aset daerahnya. Banyak ditemui aset daerah yang masih terbengkalai dan belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini diakibatkan karena kurangnya komitmen dari atasan dan juga masih banyak ditemui pegawai yang belum mumpuni dalam mengelola aset daerah. Untuk itu diperlukan adanya evaluasi terhadap pemanfaatan aset sehingga daerah dapat mengambil tindakan tegas serta langkah strategis untuk kedepannya. Optimalisasi dalam pengelolaan aset daerah sangat penting dilakukan pada saat sekarang ini. Perlu adanya strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar aset dapat dimanfaatkan dengan

¹⁶ Trisusanti Lamangida. 2018. *Manajemen Aset Publik Studi Pengelolaan Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo*. Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar.

¹⁷ Donna Okthalia Setiabudhi. 2019. *Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. The Studies of Social Science*, Vol 1 (1), Hal 7-21.

¹⁸ Erizha Fitria Marshaliany. 2019. *Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 6 (1), Hal 15-26.

¹⁹ Agung Prasetya, Bambang Haryadi, dan Siti Musyarofah. 2020. *Analisis Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah*. *Infestasi: Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 16 (1), Hal 58-68.

²⁰ Etik Winarni dan Yolanda Sari. *Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi*. 2020. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 20 (1), Hal 147-154.

²¹ Hadinur Rahman, Meyzi Heriyanto, dan Tri Sukirno Putro. *Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar*. 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 16 (1), Hal 124-130.

²² Rizka Ananda Maharani, Bambang Utoyo, dan Eko Budi Sulistio. *Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019)*. 2020. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan, dan Pelayanan Publik*, Vol 2 (3), Hal 383-392.

²³ Hasan Basri. *Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah*. 2021. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol 9 (1), Hal 86-105.

²⁴ Muhammad Safar Nasir dan Firsty Ramadhona Amalia Lubis. *Analisis Optimalisasi Aset Properti di Wilayah Kaliurang Daerah Istimewa Yogyakarta*. 2021. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol 6 (1), Hal 23-37.

²⁵ Nurul Jannah Lailatul Fitria dan Husni Mubaroq dengan. *Strategi Pengelolaan Asset Daerah Kota Probolinggo (Studi Kasus: Plaza Probolinggo Menjadi Asset Pemerintah Kota Probolinggo)*. 2021. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, Vol 6 (2), Hal 176-189.

efektif. Beberapa cara yang dapat dilakukan seperti meningkatkan kualitas SDM serta melakukan perbaikan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), melakukan pembinaan teknis terhadap pengelolaan aset, penerapan reward dan punishment, melakukan sosialisasi pengelolaan aset secara berkala, serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi baik secara internal dalam instansi pemerintah maupun secara eksternal dengan pihak swasta dan masyarakat.

Selain itu beberapa penelitian tentang pengelolaan tempat wisata yang dilakukan oleh Dolphina²⁶ dan; Slamet dan Fadjarwati²⁷ menyimpulkan bahwa pengelolaan aset di tempat wisata khususnya seperti Kebun Binatang atau Taman Marga Satwa harus dilakukan dengan optimal melalui manajemen yang profesional. Dengan adanya pengelolaan aset yang tepat akan berdampak positif sebagai pemacu pertumbuhan lingkungan, sebagai magnet pertumbuhan ekonomi, menambah PAD bagi pemerintah daerah, dan juga dapat meningkatkan nilai lahan disekitar baik secara fisik maupun fungsional.

Melihat hasil dari beberapa penelitian sebelumnya diketahui bahwa manajemen aset daerah merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintah daerah. Sementara itu pengelolaan aset daerah yang dilakukan secara tepat dan profesional akan memberikan dampak yang besar bagi peningkatan PAD. Semakin banyak kontribusi suatu aset terhadap PAD juga berdampak bagi kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan serta

²⁶ Erlin Dolphina. 2019. *Optimalisasi Pengelolaan Kebun Binatang Mangkang Sebagai Tempat Pariwisata Kota Semarang*. Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi Industri, ISSN 2085-4218, Hal 37-42.

²⁷ Fadila Febianisa Slamet dan Nurlaila Fadjarwati. 2020. *Evaluasi Kinerja Aset Fasilitas Wisata Domba di Kabupaten Garut*. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur dan Fasilitas, Vol 4 (3), Hal 183-194.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manajemen aset yang tepat dan berdaya guna serta didasari dengan prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien menjadi sangat penting karena diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Untuk menciptakan sumber pendapatan, pemerintah daerah dapat melakukan langkah strategis dalam pemanfaatan aset milik daerah serta melakukan evaluasi terhadap aset daerah yang sudah tidak terawat atau terbengkalai sehingga membutuhkan biaya penanganan dan pemeliharaan yang besar.

Beberapa literatur terdahulu menemukan bahwa manajemen aset daerah sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun masih sedikit penelitian yang terkait dengan manajemen aset daerah dalam pengelolaan tempat wisata seperti pengelolaan Taman Marga Satwa. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Manajemen Aset Daerah Dalam Pengelolaan TMSBK Kota Bukittinggi. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah dapat melakukan manajemen aset secara tepat dan profesional dalam rangka peningkatan PAD Kota Bukittinggi. Pentingnya penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sumbangan pemikiran khususnya bagi instansi terkait yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dalam mengelola aset TMSBK, sehingga pengelolaan aset dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Kota Bukittinggi merupakan kota terbesar kedua yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu kota ini juga dikenal sebagai

kota wisata terkemuka dan bersaudara dengan Seremban di Negeri Sembilan, Malaysia.²⁸ Untuk itu, Kota Bukittinggi tentunya memiliki banyak aset daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi. Salah satunya pada sektor wisata yaitu TMSBK Kota Bukittinggi.

TMSBK merupakan salah satu lembaga konservasi tertua di Indonesia yang termasuk dalam Lembaga Pemerintah yang bergerak di bidang konservasi. TMSBK telah mendapatkan izin pengelolaan Taman Margasatwa berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.233/Menhut-II/2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang pemberian izin sebagai Lembaga Konservasi dalam bentuk Taman Margasatwa kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Bidang Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.²⁹

Sebagai salah satu aset yang dimiliki oleh Kota Bukittinggi, TMSBK dapat menjadi sarana rekreasi/pariwisata yang berpotensi dan akan menarik banyak minat wisatawan serta akan bernilai jual tinggi apabila dikelola secara profesional. Disamping menjadi sarana rekreasi/pariwisata, TMSBK juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, sarana konservasi, dan sarana penelitian.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dalam pengelolaan barang milik daerah kepala daerah yang dalam hal ini yaitu

²⁸ Profil Kota Bukittinggi. (perkotaan.bpiw.pu.go.id) diakses pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 13.00.

²⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi SDA dan Ekosistem. 2018. *Statistik Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem tahun 2017*. Jakarta.

Walikota Bukittinggi mempunyai kedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, sedangkan untuk hak Pengelola Barang dimiliki oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi. Untuk membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan barang terdapat Pejabat Penatausahaan Barang yang dijabat oleh Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah yaitu Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Adapun pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang disebut dengan Pengurus Barang Pengelola yang dalam hal ini yaitu Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Selanjutnya kuasa pengguna barang dimiliki oleh kepala SKPD selaku pengguna barang, yang mana dalam pengelolaan aset TMSBK Kota Bukittinggi dimiliki oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi. Sebagai pengguna barang Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran, mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang, melakukan pencatatan dan inventarisasi aset, menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait, mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya, mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan, menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD-nya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mengajukan usul pemusnahan dan

penghapusan barang milik daerah, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan kepada Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang. Dalam menjalankan tugasnya kepala dinas sebagai Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi. Pengguna Barang juga dibantu oleh Pengurus Barang Pengguna untuk melaksanakan tugas dan fungsi administrasi barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya. Pengurus Barang Pengguna dibantu oleh Pengurus Barang Pembantu untuk mengurus barang milik daerah yang ada di TMSBK Kota Bukittinggi karena TMSBK merupakan bidang yang dibawah oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemegang Kuasa Pengguna Barang terhadap aset TMSBK Kota Bukittinggi, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi perlu melakukan langkah-langkah yang efektif dalam pengelolaannya. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi sebagai Pengguna Barang meliputi proses yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pencatatan dan inventarisasi, pemanfaatan dan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, pengawasan, pengendalian hingga penyusunan laporan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Doli D. Siregar dalam pengelolaan aset daerah harus melewati lima tahap kerja yang meliputi kegiatan inventarisasi aset,

legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset, serta pengendalian dan pengawasan yang kelimanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya.³⁰

Dalam pengelolaannya, TMSBK dikepalai oleh Kepala Bidang TMSBK yang merupakan bagian dari struktur organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi melakukan kegiatan inventarisasi aset yang merupakan kegiatan pendataan terhadap informasi atas aset-aset atau kekayaan yang dimiliki. Adapun yang bertugas dalam melakukan pencatatan aset di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi yaitu dua orang Pengurus Barang Pengguna yang dibantu oleh satu orang Pengurus Barang Pembantu TMSBK.

Tabel 1.1
Pengurus Barang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Yenny, A.Md	Pengurus Barang Pengguna	DIII Akuntansi
2.	Romi	Pengurus Barang Pengguna	SLTA-IPS
3.	Yuya	Pengurus Barang Pembantu TMSBK	DIII Akuntansi

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi, 2022.

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi memiliki tiga orang Pengurus Barang. Pengurus Barang berasal dari latar belakang pendidikan Akuntansi dan Ilmu Sosial, yang mana hal ini dapat menjadi salah satu faktor pendukung terhadap kemampuan

³⁰ Doli D. Siregar. 2004. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO'S Pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal 518-519.

yang dimiliki oleh pengurus barang dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan aset TMSBK karena dasar keilmuannya yang relevan dengan tugas yang dijalankannya. Selain itu Pengurus Barang juga akan dibekali dengan berbagai pelatihan mengenai pengelolaan barang milik daerah yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah.



Gambar 1.1 Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022

Dengan adanya pelatihan pengelolaan barang milik daerah yang diberikan kepada setiap OPD yang ada di Kota Bukittinggi, termasuk Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi akan memberikan dampak bagi peningkatan kapasitas Pengurus Barang. Adanya SDM yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam melakukan kegiatan inventarisasi aset di TMSBK Kota Bukittinggi, maka akan dapat mewujudkan tertib administrasi dalam pencatatan aset. Sehingga aset-aset yang ada dapat dikelola dan diawasi dengan baik. Berdasarkan rekapitulasi aset yang dikelola

oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi, jenis-jenis aset yang terdapat di TMSBK meliputi:

Tabel 1.2
Jenis-Jenis Aset TMSBK Kota Bukittinggi

No.	Kartu Inventaris Barang (KIB)	Jenis Aset
1.	KIB A	Tanah
2.	KIB B	Peralatan dan Mesin
3.	KIB C	Gedung dan Bangunan
4.	KIB D	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.	KIB E	Aset Tetap Lainnya
6.	KIB F	Konstruksi Dalam Pengerjaan

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi, 2022.

Pada Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa terdapat enam jenis aset yang berada di TMSBK Kota Bukittinggi. Adapun kegiatan inventarisasi aset yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi terhadap aset yang berada di TMSBK telah sesuai dengan kodifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Aset tanah meliputi luas lahan yang dipergunakan dalam kegiatan wisata; aset peralatan dan mesin meliputi peralatan yang dipergunakan dalam pengelolaan maupun kegiatan pemeliharaan lokasi wisata; aset gedung dan bangunan meliputi kandang-kandang dan seluruh bangunan yang ada di TMSBK; aset jalan, irigasi dan jaringan meliputi keseluruhan jalan dan irigasi penunjang kawasan wisata; serta aset tetap lainnya yang meliputi keseluruhan fauna dan flora.

TMSBK merupakan salah satu kebun binatang tertua yang ada di Indonesia. Pemerintah Kota Bukittinggi terus melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan dan pengembangan TMSBK untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang tentunya akan berdampak bagi kenaikan PAD Kota Bukittinggi. Sebelumnya tercatat sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai 29 Mei 2020 semua objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi ditutup karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19. Karena hal itu, diperkirakan daerah kehilangan pemasukan hingga Rp3,5 Miliar.³¹

Berdasarkan pengamatan peneliti, pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan revitalisasi area TMSBK sejak tahun 2019. Pembangunan dilakukan melalui dua tahapan. Pada tahap pertama dilakukan pembangunan yang meliputi pekerjaan struktur pada zona burung dan zona reptil. Kemudian tahap kedua dilakukan pada tahun 2020 dengan lanjutan pembangunan tahap I yang meliputi *finishing* dan *utilities* zona burung dan zona reptil, serta pembangunan zona karnivora yang berupa pembenahan kandang harimau dan pembuatan terowongan harimau beserta prasarannya.³²

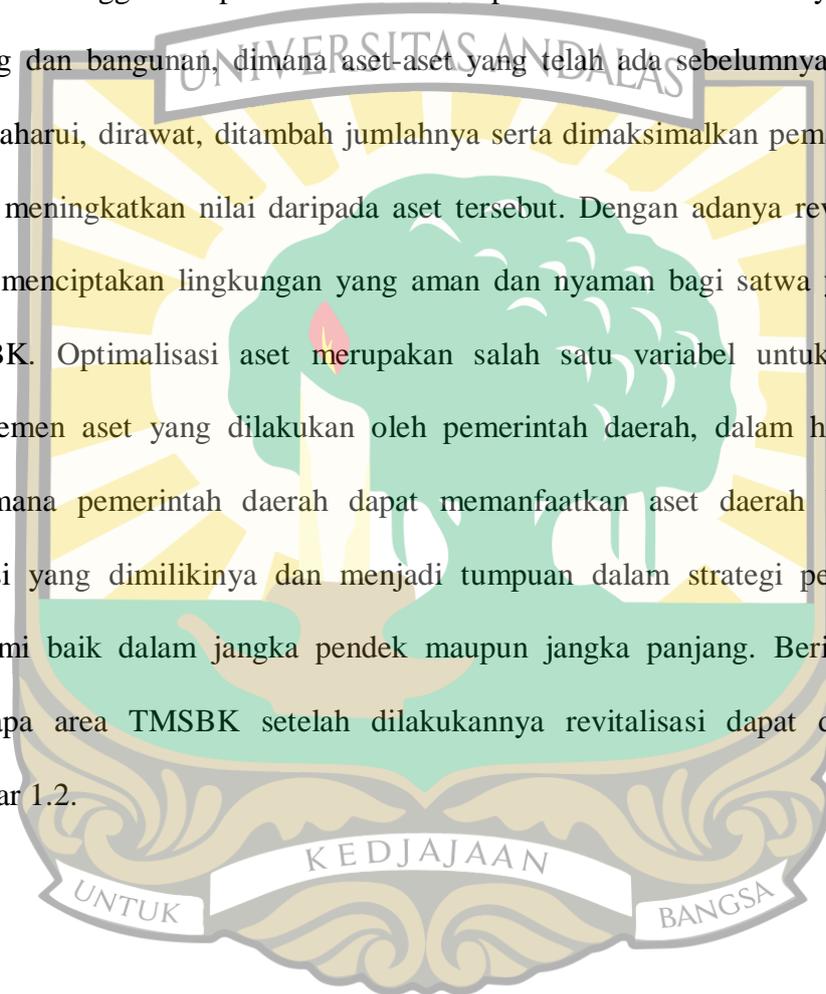
Sebelum dilakukannya revitalisasi oleh pemerintah Kota Bukittinggi, area TMSBK masih terbilang cukup buruk untuk sebuah kawasan wisata, pendidikan,

³¹ Tiga Zona Satwa di TMSBK Bukittinggi ditutup, berikut lokasinya. (sumbar.antaraneews.com) diakses pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 09.00.

³² Dua Zona Baru TMSBK Magnet Wisatawan. (rri.co.id) diakses pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 09.15.

maupun lembaga konservasi.³³ Hal ini dikarenakan kondisi kandang satwa yang tidak layak dan sering kali tidak bersih sehingga berpengaruh kepada kesejahteraan satwanya.

Adanya revitalisasi area TMSBK yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bukittinggi merupakan bentuk dari optimalisasi aset khususnya pada aset gedung dan bangunan, dimana aset-aset yang telah ada sebelumnya diperbaiki, diperbaharui, dirawat, ditambah jumlahnya serta dimaksimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan nilai daripada aset tersebut. Dengan adanya revitalisasi ini dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi satwa yang ada di TMSBK. Optimalisasi aset merupakan salah satu variabel untuk mengukur manajemen aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya dan menjadi tumpuan dalam strategi pembangunan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut tampak beberapa area TMSBK setelah dilakukannya revitalisasi dapat dilihat pada Gambar 1.2.



³³ Getha Sekartadji Mandira Yesya. 2020. *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pada Kawasan Taman Marga Satwa Dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi*. Skripsi, FISIP, Universitas Andalas, Hal. 10.



Zona Aviary atau Zona Burung (Kinantan Bird Park)



Zona Reptil



Zona Karnivora

Gambar 1.2 Tiga Zona Baru Satwa di TMSBK

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa terdapat tiga zona baru yang ada di TMSBK yaitu Zona Aviary atau Zona Burung, Zona Reptil, dan Zona Karnivora. Ketiga zona ini sudah lebih baik dari pada keadaan sebelumnya, dimana lingkungan kandang yang menjadi lebih luas dan bersih sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman baik bagi satwa yang ada maupun wisatawan yang datang berkunjung. Pemerintah Kota Bukittinggi telah meresmikan pengoperasian Zona Aviary (*Kinantan Bird Park*) pada 14 September 2020. Terhitung sejak diresmikannya Zona Aviary, tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke Bukittinggi naik signifikan.³⁴ Hal ini juga diiringi dengan mulai dioperasikannya zona reptil dan zona karnivora pada awal tahun 2021. Jumlah wisatawan yang datang ke TMSBK relatif meningkat.

Mengingat adanya pandemi Covid-19 yang mulai mewabah sejak awal tahun 2020 baik di Indonesia maupun dunia internasional, tidak dapat dipungkiri

³⁴ Dua Zona Baru TMSBK Magnet Wisatawan. (rri.co.id) diakses pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 09.15.

juga menimbulkan dampak yang cukup besar bagi kehidupan ekonomi dan sosial di Kota Bukittinggi. Untuk mendukung percepatan dalam penanganan Covid-19 ini pemerintah pun mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan melalui *refocusing* anggaran APBD tahun 2020 dengan mekanisme pergeseran anggaran. Adapun yang menjadi prioritas utama daerah yaitu pada kegiatan penanggulangan Covid-19 dalam bidang kesehatan, dan penanganan masyarakat terdampak Covid-19 berupa jaringan pengamanan sosial.

Pada tahun 2020 Kota Bukittinggi banyak melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah diusulkan sebelumnya. Banyak rencana pembangunan yang dibatalkan dan dananya dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Seperti halnya rencana pembangunan gedung baru DPRD Kota Bukittinggi yang ditunda pembangunannya karena anggaran yang telah dialokasikan digunakan untuk penanganan Covid-19.³⁵ Beberapa kegiatan pembangunan yang mengalami pengurangan anggaran dan tidak dilaksanakan karena adanya *refocusing* anggaran adalah sebagai berikut:

³⁵ Anggaran Dipakai Untuk Covid-19, Gedung Baru DPRD Bukittinggi Ditunda Dulu, (padangkita.com) diakses pada tanggal 04 Agustus 2022, Pukul 20.43.

Tabel 1.3
Kegiatan Pembangunan Yang Mengalami Perubahan Anggaran dan Tidak Dilaksanakan Karena *Refocusing* Anggaran Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No.	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan
1.	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Dinas Pekerjaan Umum	225.000.000	0.00
2.	Pembangunan Jembatan	166.730.000	0.00
3.	Peningkatan Jalan Syech Arasulli	2.100.735.985	0.00
4.	Penggantian Jembatan Jalan Prof. Bader Johan	923.663.000	0.00
5.	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi	6.984.889.915	0.00
6.	Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass	1.100.000.000	40.000.000
7.	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II	73.876.416.399	123.918.050
8.	Revitalisasi TMSBK	15.000.000.000	14.914.091.500
9.	Revitalisasi RANB	1.478.000.000	1.448.000.000

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi, 2022.

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa banyak rencana pembangunan di Kota Bukittinggi pada tahun 2020 yang anggarannya dialokasikan untuk penanganan Covid-19, bahkan kegiatannya dibatalkan karena pemerintah daerah lebih memprioritaskan anggaran pada bidang kesehatan. Kegiatan revitalisasi TMSBK yang juga dilakukan pada tahun 2020 dengan dana yang dianggarkan sebanyak 15 Miliar juga mengalami perubahan anggaran namun hanya mengalami penurunan kurang dari 1% menjadi 14,9 Miliar, begitu juga dengan revitalisasi Rumah Adat Nan Baanjuang (RANB) yang berada

didalam kawasan TMSBK mengalami penurunan anggaran sebanyak 2%. Jika dibandingkan dengan rencana pembangunan lainnya yang mengalami perubahan yang cukup drastis bahkan tidak jadi dilaksanakan, hal ini membuktikan bahwa kegiatan revitalisasi kawasan TMSBK masih menjadi prioritas bagi pemerintah daerah Kota Bukittinggi meskipun ditengah pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Revitalisasi kawasan TMSBK ini tentunya memberikan dampak yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah Kota Bukittinggi karena menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bukittinggi memiliki fokus pada pengembangan aset yang ada di daerah, salah satunya yaitu aset TMSBK yang dilakukan melalui kegiatan revitalisasi kawasan, dimana TMSBK merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Kota Bukittinggi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan Kota Bukittinggi dalam memenuhi kebutuhan PAD. Kota Bukittinggi memiliki banyak objek wisata yang potensial meliputi wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata belanja dan konferensi. Dari berbagai objek wisata potensial yang ada, TMSBK dan Taman Panorama Lobang Jepang menjadi objek unggulan yang berkontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan PAD Kota Bukittinggi. TMSBK sebagai objek wisata utama Kota Bukittinggi telah mencapai target pendapatan daerah dengan antusias pengunjung yang tidak berhenti datang. Pada tahun 2021 TMSBK telah

melewati target PAD sebesar Rp13 Miliar.³⁶ Hal ini membuktikan bahwa TMSBK memberikan pengaruh yang besar terhadap aspek ekonomi dan PAD Kota Bukittinggi. Berikut perkembangan jumlah PAD sektor pariwisata Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Perkembangan Jumlah PAD Sektor Pariwisata Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021

Sumber Pendapatan		Jumlah Pendapatan (Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Retribusi Objek Wisata	TMSBK	7.996.909.000	12.120.077.000	11.970.571.000	8.672.827.000	14.876.991.000
	Taman Panorama Lobang Jepang	4.588.000.000	4.279.825.000	4.807.770.000	2.056.195.000	1.860.079.000
Total		12.584.909.000	16.399.902.000	16.778.341.000	10.729.022.00	16.737.070.000

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi, 2022.

Pada Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa TMSBK memberikan kontribusi terhadap PAD sebanyak 75% dari dua objek wisata berbayar yang ada di Kota Bukittinggi. Dapat dilihat pada tahun 2019 dan 2020 jumlah PAD yang berasal dari TMSBK menurun daripada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya revitalisasi kawasan yang telah dimulai dari tahun 2019 sehingga beberapa objek yang ada di TMSBK pun juga ditutup dan tidak bisa dinikmati oleh pengunjung. Kemudian memasuki tahun 2020 yang mana seluruh dunia dihadapkan dengan wabah Covid-19 yang juga berdampak bagi terselenggaranya pariwisata di Kota Bukittinggi. Adanya berbagai kebijakan untuk penanganan masalah Covid-19 seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga TMSBK ditutup operasionalnya untuk sementara. Hal ini sangat berdampak bagi PAD Kota

³⁶ Kepala TMSBK: Kebun Binatang Bukittinggi Tetap Buka Saat Libur Nataru. (sumbar.antaranews.com), diakses pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 09.50.

Bukittinggi, dimana terjadi penurunan PAD sekitar 3 Miliar dari tahun sebelumnya yang berasal dari pemasukan TMSBK. Memasuki tahun 2021 seiring dengan TMSBK yang mulai dibuka kembali untuk umum dan juga revitalisasi kawasan yang telah selesai dilaksanakan, sangat berdampak bagi kenaikan PAD yang cukup signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 14,8 Miliar. TMSBK memberikan banyak manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata yang ada, tidak hanya berpengaruh bagi PAD Kota Bukittinggi, namun manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yang berjualan souvenir ataupun cinderamata di kawasan TMSBK.

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh TMSBK terhadap PAD Kota Bukittinggi tentunya terjadi karena adanya pengelolaan dan manajemen aset yang dilakukan secara efektif dan profesional. Aset TMSBK yang dirawat dan dikelola dengan baik menjadikannya sebagai daya tarik yang besar bagi wisatawan untuk berkunjung. Aset yang dimanfaatkan dan dikelola secara tepat dan optimal akan mendatangkan banyak manfaat bagi daerahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pengembangan aset TMSBK yang menjadikannya tidak hanya berfokus sebagai tempat rekreasi, namun juga sebagai lembaga konservasi dan edukasi bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut: Bagaimana Proses Pengelolaan Aset Daerah TMSBK Kota Bukittinggi? Peneliti memberikan batasan permasalahan dalam penelitian ini terkait hanya pada

pengelolaan aset jenis aset gedung dan bangunan yang ada di TMSBK Kota Bukittinggi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Proses Pengelolaan Aset Daerah TMSBK Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang proses pengelolaan aset daerah TMSBK Kota Bukittinggi serta dapat menjadi rujukan pada penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti instansi terkait yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dalam upaya pengelolaan aset daerah di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi.

